

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Agus, S. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Media Grup.
- Cresswell, J. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach. (3rd)*. Sage Publication.
- Faradhiba, L., dan Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(07).
- Hanifah, S.I., dan Sugeng, P. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.
- Jensen, Michael C., & W., H. M. (1976). Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nawawi, H. (2003). *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit yang Kompetitif* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Siagina, S. (2003). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Sugiyono. (2012.) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, A. (2018). Laporan Keuangan sebagai Perwujudan Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6 (12), 128-138.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Negara Republik Indonesia.